

**PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM
PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA KOMUNITAS LESBIANS, GAY,
BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA**

Name : Zulhadi Kurfay

Email : zulhadikumpai@gmail.com

Supervisor : Dr. Afrizal, S.IP. MA

Bibliography : 11 Books, 9 Journals, 13 Articles, 5 Websites

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km.12,5 smp. Baru Pekanbaru 28293-
telp/fax. 0761-63277**

ABSTRACT

This study discusses "The Role of The United Nations Development Programme (UNDP) in The Human Rights Struggle of The LGBT Community in Indonesia". Many LGBT people in Indonesia experience violence, discrimination and human rights violations, because there are no Indonesian Government regulations that provide rights to security and the right to freedom of assembly and association for LGBT people. As a result this problem, UNDP provides assistance to the LGBT community in Indonesia.

The method use in this study is qualitative explanative. This study uses secondary data using library research. This study uses the Perspective of Pluralism by Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, Level Analysis of Group Behaviour and Theories of International Organization by J. Clive and Role Theory by Samuel J Barkin.

The result of this research is the role of the UNDP in fighting for the LGBT community in Indonesia such as advocacy, dialogue, providing understanding, campaigning and providing assistance to the LGBT community in Indonesia. UNDP fights for human rights by creating the "Being LGBT in Asia" program and providing financial assistance to the LGBT community in Indonesia.

Keywords : LGBT, Pluralism, Human Right, UNDP, Indonesia.

Pendahuluan

Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi persamaan hak pada tanggal 17 juni 2011 yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi ini adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama. Merupakan bait pertama dari Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) ini. Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat setiap orang berhak memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, tetapi hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian.

Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.¹

Diskriminasi eksplisit dan homofobia kekerasan dilakukan terutama oleh para ekstremis religius, sementara diskriminasi halus dan marginalisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara teman-teman, keluarga, di tempat kerja atau sekolah. Orang-orang LGBT sering mengalami pelecehan yang dilakukan oleh para polisi tetapi sulit untuk mendokumentasikannya karena korban menolak untuk memberikan pernyataan karena seksualitas mereka. Orang-orang LGBT sering ditangkap atau dituduh karena orientasi seksual mereka. Juga gay di penjara mengalami pelecehan seksual karena orientasi seksual mereka, dan sering tidak melaporkannya karena menjadi trauma dan takut dikirim kembali ke penjara dan mengalami kekerasan lebih lanjut.²

Dengan berbagai permasalahan yang ada muncullah sebuah ideologis pergerakan untuk menuntut agar Pemerintah Indonesia mengakui hak-hak LGBT di negaranya dan menuntut agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Upaya yang dilakukan melalui gerakan social oleh aktivis-aktivis dan INGO atau NGO dengan melakukan dukungan kepada komunitas LGBT di Indonesia agar Pemerintah Indonesia mengakui hak-hak LGBT sesuai dengan Declaration of

¹ Difficult for Indonesia to legalize gay marriage: Minister". The Jakarta Post. Jakarta. 2 July 2015

² "Exclusive: 'Gay Muslim comic' artist @alPantuni talks to us about leaving Instagram and his recent return | Coconuts Jakarta"

Human Rights oleh PBB yang telah ditanda tangani dan disepakati oleh seluruh Negara di dunia.

United Nations Development Programme (UNDP) adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Salah satunya program Being LGBT in Asia.

UNDP mendukung Komunitas LGBT di Indonesia untuk menuntut agar adanya pengakuan yang penuh oleh pemerintah Indonesia mengenai hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum LGBT di Indonesia. Meminta komitmen pemerintah Indonesia untuk siap dan menjaga seluruh warga negaranya terlepas dari apapun orientasi seksual mereka.

Rumusan Masalah

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia.

Banyaknya diskriminasi di terhadap kaum LGBT di Asia, khususnya Negara Indonesia. United Nations Development Programme (UNDP) mempunyai peran dalam perjuangan hak-hak kaum LGBT di Indonesia.

Dengan menjelaskan bagaimana peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam perjuangan hak-hak kaum LGBT di Indonesia. Penulis berupaya

memunculkan suatu pernyataan dalam tulisan ini sebagai rumusan masalah yang bertujuan membantu penulis untuk

mempermudah dalam membahas permasalahan yang diteliti.

Adapun permasalahan yang diangkat penulis yakni: **BAGAIMANA PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNPD) DALAM PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA KOMUNITAS LESBIANS, BISEKSUAL, GAY DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA?**

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, data-data yang didapatkan pada penelitian kualitatif tidak dapat dari perhitungan-perhitungan statistika ataupun berbagai hal yang menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan menggunakan penjelasan ataupun alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Serta metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data dalam literature seperti buku cetak, jurnal, paper, koran online atau sumber website yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Program Pembangunan PBB (UNDP), memiliki strategi jangka panjang terkait isu LGBT melalui program bernama The Being LGBT in

Asia Phase 2 Initiative (BLIA-2). Program ini juga didukung Kedutaan Besar Swedia di Bangkok, Thailand, dan lembaga pendanaan AS, USAID. Tujuan program tersebut adalah memperjuangkan HAM untuk LGBT. Negara sasaran proyek tersebut adalah Tiongkok, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Jangka waktu kerja proyek dengan dana senilai 8 juta dolar AS tersebut berlangsung dari 2014 hingga 2017. Ide kebebasan dan penghormatan terhadap legalisasi LGBT di dalamnya terdapat sebuah kepentingan dalam rangka memenangkan peperangan antara kekuatan agama dan moralitas yang berada di Timur dengan kekuatan sekuler dan antiagama yang berada di Barat (A war of secular and anti religious forces against religious and moral forces).

Program United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP dan staf kantor di atas tanah di 166 negara, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu mereka menemukan solusi untuk global dan tantangan pembangunan nasional. UNDP berfokus pada enam program pembangunan terutama :

1. Mendukung Pemerintahan Dengan Sistem Demokratis UNDP mendukung pemerintahan demokratis demokratis dengan menyediakan nasihat kebijakan dan dukungan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu dalam negara, dan mendidik masyarakat tentang advokasi untuk reformasi demokrasi, mempromosikan dialog dan negosiasi, dan berbagi pengalaman sukses dari negara lain dan lokasi. UNDP juga mendukung lembaga demokratis yang

ada dengan meningkatkan dialog, meningkatkan debat nasional, dan memfasilitasi consensus nasional pada program-program pemerintahan.

2. Menangulangi Kemiskinan.

UNDP membantu negara-negara mengembangkan strategi untuk memerangi kemiskinan oleh memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya, program-program yang menghubungkan kemiskinan dengan negara tujuan dan kebijakan yang lebih besar n memastdaikan suara yang lebih besar bagi masyarakat miskin. UNDP juga bekerja di tingkat makro untuk reformasi perdagangan, mendorong utang dan investasi asing, yang paling miskin dan memastikan masyarakat miskin mendapatkan keuntungan dari globalisasi.

Di lapangan, UNDP merupakan sponsor pembangunan proyek-proyek percontohan, mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan, dan upaya koordinat antara pemerintah, LSM, dan donor luar. Dengan cara ini, UNDP bekerja sama dengan pemimpin lokal dan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk membuat usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi. Misalnya saja Indonesia, kualitas manusia Indonesia benarbenar jauh lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara "terbelakang" seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109), dan Aljazair (108).

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normative yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada dasarnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling sehubungan dan saling bergantung.

Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada Negara, atau dalam kata lain negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia termasuk dengan mencegah dan menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, social dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang public (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak kesehatan atau hak atas perumahan).

Pada tataran internasional, wacana hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sejak diproklamirkannya The Universal Declaration of Human Right tahun 1948, telah tercatat dua tonggak historis lainnya dalam petualangan penegakkan hak asasi manusia internasional. Pertama, diterimanya dua kovenan (covenant) PBB, yaitu mengenai hak sipil dan hak politik serta hak ekonomi, social dan budaya. Dua Covenant itu sudah dipermaklumkan sejak tahun 1966, namun baru berlaku sepuluh

tahun kemudian setelah diratifikasi tiga puluh lima Negara anggota PBB. Kedua, diterimanya deklarasi Wina beserta program aksinya oleh para wakil dari 171 negara pada tanggal 25 juni 1993 dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria. Deklarasi yang kedua ini merupakan kompromi antar visi Negara-negara di barat dengan pandangan Negara-negara berkembang dalam penegakan hak asasi manusia.

Sejarah Berkembangnya LGBT di Dunia

Jeremy Bentham (1785) seorang tokoh filsuf reformis dibidang sosial juga membela kaum homoseksual. Bentham sering memberikan masukan tentang hukum homoseksual di Inggris. Pemikiran Bentham menyumbangkan inspirasi perubahan aturan hukum terhadap kaum homoseksual mengenai homoseksual bukan suatu tindakan kriminal di Negara Eropa lainnya. Pada tahun 1791 Prancis adalah negara pertama yang menerapkan hukum bahwa homoseksual bukan termasuk tindakan criminal.³

Gerakan Free Love yang membangkitkan kaum feminis dan kebebasan hidup juga turut memperjuangkan kaum homoseksual kepada publik. Gerakan ini kerap memandang budaya sucinya pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan hidup dan JOM FISIP Volume 4 No. 2 - Oktober 2017 Page 5 pilihan. Pada masa ini hampir semua negara di Eropa dan Amerika melahirkan tokoh reformis yang membela hak-hak kaum feminis,

³ Sinyo, 2014

kehidupan bebas, dan komunitas homoseksual.⁴

Beberapa gerakan sosial seperti The Black Power yaitu gerakan untuk memperjuangkan hak kaum berkulit hitam dan Anti-Vietnam War mempengaruhi komunitas gay untuk lebih terbuka. Masa ini dikenal dengan Gay Liberation Movement atau gerakan kemerdekaan gay. Pada masa ini terjadi huru-hara yang terkenal dengan sebutan Stonewall Riots, yaitu keributan sporadic antara polisi dan para pendemo yang memperjuangkan kebebasan kaum gay. Keributan ini terjadi di Stonewall Inn, Greenwich Village, Amerika Serikat pada 28 Juni 1969. Kejadian 28 Juni 1969 tersebut tercatat dalam sejarah sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi kaum gay di Amerika Serikat dan dunia, sehingga muncul komunitas-komunitas gay baru seperti Gay Liberation Front (GLF), The gay Activists' Alliance (GAA), dan Front Homoseksual d'Action Revolutionnaire. Pada tanggal tersebut juga dijadikan hari perayaan bagi kaum LGBT di seluruh dunia dan pada hari tersebut mereka menggelar pawai di jalan utama untuk menunjukkan eksistensi kaum gay. United Nations Development Programme (UNDP) bersama United States Agency for International Development (USAID) terlibat dalam perjuangan homoseksual secara internasional. Salah satu langkah yang diambil adalah membentuk sebuah wadah internasional homoseksual khususnya negara-negara Asia yang bernama 'Being LGBT in Asia'. Salah satu negara yang terlibat adalah Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dialog-

dialog LGBT di beberapa negara di Asia.

Sejarah dan Perkembangan LGBT di Indonesia

Komunitas homoseksual mulai bermunculan di kota-kota besar pada zaman Hindia Belanda. Komunitas kecil LGBT sudah muncul di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, meskipun pada waktu itu komunitas tersebut belum muncul sebagai pergerakan sosial. Pada tahun 1968, istilah wadam (wanita adam) digunakan sebagai pengganti kata banci atau bencong yang dianggap memiliki konotasi negatif. Istilah wadam sendiri memiliki makna yang sama dengan banci, yaitu laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan. Setelah itu didirikan organisasi wadam yang pertama, dibantu serta difasilitasi oleh gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Organisasi tersebut bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD).

Pada tahun 1985 berdiri juga komunitas gay di Yogyakarta. Organisasi tersebut bernama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Tahun 1988 PGY berubah nama menjadi Indonesian Gay Society (IGS). Tanggal 1 Agustus 1987 berdiri kembali komunitas gay di Indonesia, yaitu berdirinya Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN). GN didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia. GN menerbitkan majalah GAYa Nusantara. Pada tahun 1990 muncul organisasi gay di hampir semua kota besar di Indonesia seperti

⁴Paul, EeNam Park Hagland. 2012. International Theory and LGBT Politics: Testing

Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Malang.⁵

Pada akhir tahun 1993 diadakan pertemuan pertama antar komunitas LGBT di Indonesia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta dan diberi nama Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I atau yang dikenal sebagai KLG I. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 40 orang dari seluruh Indonesia yang mewakili daerahnya masing-masing. GAYA Nusantara mendapat mandat untuk mengatur dan memantau perkembangan Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia (JLGI). KLG II dilaksanakan pada bulan Desember 1995 di Lembang, Jawa Barat. Peserta yang hadir melebihi dari KLG I dan datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Tanggal 22 Juli 1996, salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD), mencatat diri sebagai partai pertama di Indonesia yang mengakomodasi hak-hak kaum homoseksual dan transeksual dalam manifestonya. Kemudian KLG III diselenggarakan di Denpasar, Bali pada bulan November 1997. KLG III merupakan pertama kalinya para wartawan diperbolehkan meliput kongres di luar sidang-sidang. Hasil kongres ini adalah peninjauan kembali efektivitas kongres-kongres sebelumnya sehingga untuk sementara akan diadakan rapat kerja nasional sebagai gantinya. Untuk pertama kalinya Gay Pride dirayakan secara terbuka di kota Surabaya pada bulan Juni tahun 1999. Acara tersebut merupakan kerja sama antara GN dan Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS). Pada tahun ini juga Rakernas yang rencananya akan

⁵Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hal. 24

diselenggarakan di Solo batal dilaksanakan karena mendapat ancaman dari Front Pembela Islam Surakarta (FPIS).

Tanggal 7 November 1999 pasangan gay Dr. Mamoto Gultom dan Hendry M. Sahertian melakukan pertunangan dan dilanjutkan dengan mendirikan Yayasan Pelangi Kasih Nusantara (YPKN). Yayasan ini bergerak dalam bidang pencegahan dan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS dikalangan komunitas gay di Indonesia.⁶

Pada tanggal 4 Februari 2007 berdiri Jaringan Gaya Warna Lentera (GWL-INA) di Surabaya. GWL-INA ini didukung secara teknis dan didanai oleh Australian Federation of AIDS Organizations Inc. (AFAO) dan GAYA Nusantara. Pada Oktober dan November 2008 dengan bantuan pendanaan dari AFAO, jaringan dapat menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan konsultasi wilayah pertama di Batam, Makassar dan Surabaya. Pertemuan ini telah menghasilkan rekomendasi rekomendasi penting bagi kelangsungan jaringan GWL-INA di masa datang. Salah satu dari rekomendasi penting adalah untuk melaksanakan pertemuan nasional pertama jaringan GWL-INA untuk mengesahkan jaringan secara hokum dan membentuk badan organisasi yang terpilih secara demokrasi serta menguatkan sekretariat nasional untuk memperlancar kerja dari jaringan GWL-INA.⁷

Pada tahun 2010, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) berencana

⁶ Ibid, hal. 30

⁷ <https://www.gwl-ina.or.id/sejarah/>

mengadakan konferensi regional ke-4 di Indonesia pada tanggal 26-28 Maret 2010. Konferensi dengan tema yang mengangkat "LGBT Asia Moving Forward!" yang akan diikuti lebih dari 150 aktivis LGBT dari seluruh penjuru Asia.⁸ Akan tetapi konferensi ini akhirnya dibatalkan karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian.⁹

Berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, jumlah kaum LGBT di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap jumlah lelaki berhubungan seks dengan lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan., terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180 orang) mengidap HIV. Sementara, PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011. Padahal, pada 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis.¹⁰

Pada tahun 2016, terjadi penyerangan masif terhadap kaum

LGBT di Indonesia. Hal itu dilontarkan peneliti sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Arus Pelangi, Yuli Rustinawati. Dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2016, terdapat 142 kasus penangkapan, penyerangan, diskriminasi, pengusiran, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok LGBT. Orang-orang dan aktivis LGBT di Indonesia menghadapi perlawanan yang sengit, serangan homofobia, dan ujaran kebencian, bahkan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.¹¹

Pada tahun yang sama, Human Rights Watch mendesak Pemerintah Indonesia untuk membela hak-hak kaum LGBT dan secara terbuka mengutuk komentar-komentar pejabat yang dianggap diskriminatif.¹²

Perkembangan komunitas LGBT dapat dilihat dari adanya organisasi-organisasi komunitas LGBT. Perihal jumlah, komunitas LGBT di Indonesia tidak memiliki angka pasti. Hal tersebut karena masih banyak di antara mereka yang enggan untuk menyatakan identitas dan orientasi seks mereka karena kuatnya dominasi budaya dan agama. Apalagi Indonesia tidak atau belum mengakui keberadaan LGBT sebagai kelompok sosial. Setidaknya terdapat sebanyak 119 organisasi atau komunitas LGBT di 28 dari 34 propinsi di Indonesia.¹³

⁸Liputan 6: Konferensi ILGA Ke-4 <https://www.liputan6.com/news/read/269245/konferensi-ilga-ke-4-akan-diadakan-di-indonesia>

⁹ Tempo.co: Batal Ikut Konferensi ILGA, Kaum Gay dan Lesbi Plesiran di Surabaya <https://nasional.tempo.co/read/235396/batal-ikut-konferensi-ilga-kaum-gay-dan-lesbi-plesiran-di-surabaya>. diakses pada tanggal 6 Juli 2019

¹⁰ Hartanto, Op. Cit, hal. 36

¹¹ Alisa Tang, Under Attack, Indonesian LGBT Groups Set Up Safehouses, Live in Fear <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-gay-rights-idUSKCN0WB02Z>

¹² Indonesia: Flurry of Anti-Gay Statements by Officials <https://www.hrw.org/news/2016/02/11/indonesia-flurry-anti-gay-statements-officials>

¹³ (Oetomo dkk. 2013).

Diskriminasi, Persekusi dan Pelanggaran HAM Terhadap Kaum LGBT di Indonesia

Di Indonesia kelompok LGBT menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terus mendapatkan diskriminasi multidimensional. Diskriminasi di sini dapat diartikan sebagai pelayanan dan/atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana pelayanan/perlakuan berbeda ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut, seperti karakteristik kelamin, orientasi seksual, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain, yang tidak mengindahkan tujuan yang sah atau wajar.

Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.¹⁴

Tingginya sentimen publik terhadap kelompok LGBT memicu upaya-upaya untuk mengeksklusi kelompok LGBT dalam kehidupan bermasyarakat yang juga mengarah

pada persekusi.¹⁵ Tindakan-tindakan pelanggaran kegiatan diskusi di ruang akademik, diskriminasi di tempat kerja dan pendidikan hingga usaha untuk mengkriminalisasi LGBT lewat jalur peradilan dan legislasi tampak semakin sering terjadi.¹⁶

Peran United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia

UNDP memiliki peran dalam perjuangan HAM Komunitas LGBT di Indonesia dengan membuat program dan memberikan bantuan dana kepada komunitas LGBT di Indonesia.

Program Being LGBT in Asia

Being LGBT in Asia, sebagai upaya kolaborasi antara UNDP dengan USAID, bertujuan untuk memahami, memetakan dan menganalisa situasi hak-hak kelompok LGBT di berbagai lingkungan masyarakat dan Negara dengan menyusun analisa dan tinjauan situasi komunitas LGBT dan hak-hak asasi manusi. Program ini berusaha untuk mengatasi kesenjangan penelitian besar yang saat ini ada pada stigma, diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh minoritas seksual dan gender di Asia. Dengan mengatasi

¹⁵ Dalam konteks hukum hak asasi manusia persekusi merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Statuta Roma. Persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok atau golongan tertentu.

¹⁶ "LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia <http://lbhmasyarakat.org/wpcontent/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>, hal 13

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/diskriminasi>

kesenjangan ini, program ini berusaha untuk melengkapi para pengemban tugas dengan informasi strategis yang diperlukan untuk mengatasi stigma dan diskriminasi secara memadai, mengakhiri praktik berbahaya yang memicu pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu LGBTI di lingkungan publik dan swasta, dan untuk memastikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini memiliki akses yang sama ke keadilan dan pelayanan publik. Hanya di negara-negara Asia tertentu.

Melibatkan Lembaga Nasional Dan Daerah

USAID dan UNDP menerapkan tinjauan dan analisis penting tentang keadaan LGBT di 18 negara Asia. Ditemukan bahwa orang-orang LGBT Asia menderita tidak hanya dari kebijakan dan undang-undang yang tidak mendukung, tetapi juga stigma dan diskriminasi tingkat tinggi, yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan orang-orang LGBT mulai dari keluarga dan tempat kerja hingga penegakan hukum, media dan layanan kesehatan dan pendidikan.¹⁷

Advokasi dan Kebijakan Perlindungan LGBT

Dalam melakukannya, "Being LGBT in Asia" memobilisasi penelitian kebijakan dan operasional, dan pengembangan strategi di antara populasi kunci termasuk komunitas berbasis agama dan sektor swasta untuk secara efektif menangani masalah LGBT dan orientasi seksual-identitas gender.

Membangun Kemitraan, Dialog Dan Pemahaman

¹⁷<https://www.usaid.gov/documents/2496/being-lgbt-asia>

Kemitraan ini telah meninjau hak-hak LGBT di 18 negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, membangun dialog tingkat nasional dan menerbitkan laporan untuk delapan negara fokus: Kamboja, Cina, Indonesia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Laporan LGBT Nasional

Laporan nasional mendapatkan dukungan UNDP dan USAID melalui prakarsa regional 'Being LGBT in Asia' (Hidup Sebagai LGBT di Asia) yang dirilis pada tahun 2017.¹⁸

Prakarsa pembelajaran bersama ini, yang mencakup delapan negara yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Viet Nam, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai tantangan baik hukum, politik maupun social yang dihadapi kelompok LGBT, aspek hukum dan kebijakan yang terkait, serta peluang akses mereka akan layanan peradilan dan kesehatan. Prakarsa ini juga akan membahas kebutuhan berbagai organisasi LGBT, ruang gerak mereka, kapasitas organisasi-organisasi ini untuk melibatkan diri pada dialog kebijakan dan hak asasi manusia, serta peran teknologi baru dalam Laporan ini mencakup hasil-hasil temuan Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia termasuk hasil kajian pustaka dan analisa publikasi tentang permasalahan LGBT, baik di dalam maupun luar Indonesia.

Setelah Ringkasan Eksekutif yang memuat berbagai rekomendasi bagi komunitas dan organisasi LGBT, pemerintah dan lembaga-lembaga

¹⁸ <https://rumahcemara.or.id/book/hidup-sebagai-lgbt-di-asia-laporan-nasional-indonesia/>

internasional, bagian Pendahuluan laporan ini diikuti dengan sekilas sejarah advokasi LGBT di Indonesia, termasuk perspektif sejarah mengenai beragam orientasi seksual dan identitas gender, serta ulasan pengembangan gerakan LGBT selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Disajikan pula penjelasan umum tentang hak-hak LGBT di Indonesia sehubungan dengan undang-undang, kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya serta agama, serta penelusuran berbagai perbedaan antardaerah mengenai penerimaan dan pengorganisasian LGBT, dan bagaimana pendapat warganegara Indonesia tentang hukum dan korupsi berdampak pada hak-hak LGBT.

Sebuah bagian tambahan akan mengulas situasi khusus mengenai hak-hak LGBT di Aceh, mendukung advokasi LGBT. Penelusuran tentang perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia diperoleh terutama dari kelompok-kelompok diskusi yang diselenggarakan pada Dialog Nasional dan mencakup bidang-bidang kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan, urusan keluarga, media dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta hukum, hak asasi manusia dan politik. Laporan ini juga memuat beberapa studi kasus yang menggambarkan konteks hak asasi manusia yang relevan, terutama berdasarkan laporan dari para peserta dialog. Bagian akhir laporan menyampaikan hasil survei tentang kapasitas organisasi-organisasi LGBT di Indonesia.

Dialog Komunitas Nasional

Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali, sebagai kegiatan utama

komponen Indonesia dalam rangka prakarsa 'Being LGBT in Asia'. Dialog ini diorganisir sebagai kerjasama dengan dua jaringan nasional, yaitu GWL-INA yang berhubungan dengan permasalahan HIV dan Forum LGBTI Indonesia. Jaringan GWL-INA terdiri dari organisasi berbasis masyarakat dan non-pemerintah yang berusaha mengendalikan penyebaran HIV di kaum pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Sedangkan Forum LGBT Indonesia terdiri dari sebagian besar organisasi yang sama, serta organisasi lain yang bekerja untuk kaum lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT) dan organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.¹⁹

Dialog Nasional ini dihadiri oleh 71 peserta dari 49 lembaga termasuk wakil-wakil organisasi LGBT dari 15 di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia, di samping wakil-wakil pemerintah pusat, lembaga hak asasi nasional, lembaga donor, perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah untuk hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat madani, serta sejumlah tokoh agama. Secara khusus hadir peserta dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas di Universitas Indonesia, STT Jakarta, Konferensi Internasional tentang Agama dan Perdamaian, ASEAN SOGI Caucus (Kaucus Orientasi Seksual dan Identitas Gender ASEAN/ASC), Australian Agency for International Development (AusAID), organisasi bantuan pembangunan Belanda yaitu Hivos, Human Rights Working Group

¹⁹ www.asia-pacific.undp.org.

(HRWG), International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) se-Asia, Islands of South East Asia Network of Male and Transgender Sexual Health (ISEAN), Bank Dunia, UNAIDS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 36 organisasi LGBT. Selain itu hadir pula para aktivis dari jejaring penyelenggara, yaitu GWL-INA dan Forum LGBTIQ Indonesia, juga pejabat dan staf kantor regional UNDP dan USAID serta dua fasilitator pertemuan.

Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia dan laporan nasional mendapatkan dukungan dari UNDP dan USAID melalui prakarsa regional 'Being LGBT in Asia' (Hidup Sebagai LGBT di Asia). Prakarsa pembelajaran bersama ini, yang mencakup delapan negara yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Viet Nam, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai tantangan baik hukum, politik maupun social yang dihadapi kelompok LGBT, aspek hukum dan kebijakan yang terkait, serta peluang akses mereka akan layanan peradilan dan kesehatan. Prakarsa ini juga akan membahas kebutuhan berbagai organisasi LGBT, ruang gerak mereka, kapasitas organisasi-organisasi ini untuk.

Rekomendasi

Dialog Nasional ini yang didukung oleh UNDP ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada komunitas LGBT Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional sebagai hal yang perlu ditindak lanjuti dan diprioritaskan selama tahun 2013-2017.

Organisasi Internasional seperti UNDP memiliki peran yang signifikan

dalam mengatasi isu-isu kemanusiaan di Negara berkembang. Menurut J Samuel Barkin peran organisasi internasional dapat dilihat dari segi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Melihat dari segi hak asasi manusia, organisasi internasional memiliki peran untuk mencari permasalahan yang menyangkut dengan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat serta mempromosikan dan mengakui hak-hak asasi manusia.

Melihat dari segi bantuan kemanusiaan, organisasi internasional memiliki peran untuk mengidentifikasi dan mempublikasikan area-area yang membutuhkan bantuan, memfokuskan diri untuk mencari adanya dana bantuan kemanusiaan, memenuhi kebutuhan dasar dari jutaan orang yang membutuhkan bantuan, serta memberikan atau menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Dana sebesar US\$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan kepada beberapa negara yang kemitraannya salah satunya adalah Indonesia. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI).²⁰

Dalam situs resmi UNDP disebutkan tujuan dari proyek kemitraan regional yang berlangsung selama tiga

²⁰<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/12/o2fsmh282-undp-keluarkan-rp-108-miliar-untuk-lgbt-indonesia>

tahun ini, untuk mendukung kaum LGBT mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan untuk melaporkan pelanggaran HAM.²¹

Kesimpulan

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, Indonesia juga menandatangani berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang mempromosikan hak asasi manusia. Ini termasuk Kovenan Internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya hak (sipil), Konvensi tentang penghapusan dari semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), konvensi hak-hak dari anak (UNCRC), Konvensi Menentang Penyiksaan dan lainnya, Konvensi Tentang larangan dan penghapusan pekerja anak, dan konvensi hak-hak orang cacat.

Peran UNDP dalam memperjuangkan HAM komunitas LGBT di Indonesia dibuktikan dengan Program Being LGBT in Asia. United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Dana sebesar US\$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan kepada beberapa negara yang kemitraannya salah satunya adalah Indonesia. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI).

Disebutkan UNDP, bahwa inisiatif ini adalah kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan

institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif, serta memberdayakan masyarakat sipil. Di dalam keterangan situs UNDP menyebutkan kalau proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 mendatang.

Kemudian UNDP pun merinci sejumlah tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Adapun hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek ini, salah satunya adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBT untuk secara efektif memobilisasi, menyokong dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas serta membantu LGBT untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahun 2017 UNDP bersama USAID mendukung Komunitas LGBT di Indonesia dengan menghasilkan Laporan LGBT Nasional yang berisikan laporan LGBT nasional berupa rekomendasi-rekomendasi ditujukan kepada komunitas LGBT Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional sebagai hal yang perlu ditindak lanjuti dan diprioritaskan selama tahun 2013-2017.

Walaupun UNDP memiliki peran dalam perjuangan HAM komunitas LGBT di Indonesia, Negara Indonesia tidak memberikan ruang karena bertentangan dengan ideology Negara.

Buku-Buku:

Shankle, Michael D. (2006) *The Handbook of Lesbians, Gay, Bisexual and Transgender*

²¹<https://nasional.okezone.com/read/2016/02/14/337/1311590/pemerhati-pertanyakan-dana-usd8-miliar-untuk-lgbt-indonesia>

Public Health: A Practitioner's
Guide To Service

- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37
- Clive Archer, 1997. International Organization: Principles and Issues, (New Jersey: Prentice Hall Inc) hlmn 130
- Viotti, Paul R, dan Kauppi, Mark V.1990 International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan inc, New York, hlm 215
- Agus Haryanto. Desember 2014. "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", Vol. 4, No. 02.
- Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993
- Mas'ood, Muchtar. 1990. Ilmu hubungani nternasional: Displin dan Meteodologi. Jakarta: PT. Pusaka LP3ES Indonesia
- Mardalis. Metode Penelitian Suatu Penedekatan Proposal: 2004. Jakarta: Bumi Aksara.
- Holsti K J 1987. Politik Internasional Suatu Analisa. Bina Cipta, Bandung Hlm 159
- Victoria Clark, Sonja J. Ellis, Elizabeth Peel, Damien W. Riggs, Lesbian Gay Bisexual Trans And Quer Psychology, (New York: Cambridge University Press, 2010),

JURNAL

- Laurent, Erick (May 2001). "Sexuality and Human Rights". Journal of Homosexuality. Routledge. 40 (3&4): 163–225
- Saeri, M. 2012. Teori Hubungan Intrnasional Sebuah pendekatan paradigmatic. Jurnal Transnasional, Vol 3, no. Hal 15
- Barkin J Samuel. 2006, International organization, theories and institutions", New Yoork: Palgrave Macminan
- Ali, I. S. (2016) LGBT Sebuah Isu untuk Kepentingan Besar (online). ICMI.
- Tama, Aira. 2016 Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Melegalkan Pernikahanlesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Di Tiongkok
- Brems, Eva (2001). Human Rights: Universality dan Diversity. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Koehane, Robert O & Lisa L Martin. (1995). "The Promise of Institutional Theory". International Security 20
- Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)." Community: Pengawas Dinamika Sosial 4, no. 1 (2018): 105-122.
- Taebenu, Olivia JS. "The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual,

Transgender) Menurut Hak
Asasi Manusia." *Lex et
Societatis* 2, no. 8 (2014).

Website

www.undp.com

www.usaid.org

rumahcemara.com

lbhm.com

Dokumen

Being LGBT in Asia

Being LGBT in Asia, Indonesia Report